

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan motivasi dan implemetasi kebijakan NetzDG di Jerman serta menjelaskan pengaruh Kebijakan NetzDG terhadap Kebebasan Berpendapat di Jerman tahun 2017-2018. Penelitian ini terlebih dahulu menjelaskan motivasi negara-negara dalam melakukan penyensoran internet baik negara demokrasi ataupun negara non-demokrasi. Jika pada negara non-demokratis penyensoran cenderung dilakukan dengan tindakan keras untuk membuat kontrol pemerintah semakin meningkat, maka sensor internet pada negara demokratis dilakukan untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang ada. Jerman sebagai salah satu negara demokratis juga menerapkan sensor internet melalui undang-undang penegakan jaringan yang disebut NetzDG. Sementara itu, dengan diberlakukannya penyensoran internet di sebuah negara, tentu saja akan bersinggungan dengan hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh masyarakat dan memiliki aturan hukum baik nasional ataupun internasional.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat memahami mekanisme sensor internet Jerman bersama dengan NetzDGnya sehingga dapat mengukur pengaruh yang ditimbulkan terhadap tingkat kebebasan berpendapat secara daring khususnya pada periode 2017-2018. Sehingga hipotesa pada penelitian ini adalah jika Jerman menerapkan mekanisme sensor internet minimal dalam bentuk penyaringan selektif, maka akan memberikan implikasi khususnya terhadap masyarakat dalam menggunakan media sosial serta menyuarakan pendapatnya terkait isu tertentu.

Pada bab 4 bagian pembahasan penelitian ini, ditemukan keterkaitan motivasi sensor internet dengan konsep Meserve dan Pemstein dalam mengkategorikan insentif politik negara-negara demokratis dalam melakukan sensor. Dari ketiga motivasi yang ada (kerusuhan internal, hak kekayaan intelektual, institusi politik domestik), kerusuhan internal berperan dominan sebagai motivasi sensor internet di Jerman. Krisis pengungsi yang terjadi sejak tahun 2015 memang menjadi permasalahan utama negara-negara Uni Eropa yang membuka negaranya untuk para pengungsi tersebut termasuk Jerman. Kebijakan buka pintu Angela Merkel menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka

pengungsi pertahun yang datang ke Jerman. Hal ini pun menjadi bahasan pro dan kontra khususnya bagi warga negara Jerman itu sendiri. Sejalan dengan krisis pengungsi yang terus terjadi hingga tahun 2017, angka kriminalitas di Jerman juga semakin meningkat. Jumlah kejahatan dengan tersangka warga negara Jerman mengalami penurunan pada tahun 2014-2015, namun sebaliknya jumlah kejahatan dengan kewarganegaraan non-Jerman justru semakin meningkat disebabkan oleh arus migrasi yang semakin besar. Keadaan tersebut membuat masyarakat Jerman menjadi kehilangan rasa aman sebagai warga negara dan menyebabkan situasi yang tidak terkendali. Kejahatan rasial (*Hate Crime*) terhadap para pengungsi juga semakin marak terjadi baik offline ataupun online sehingga membangkitkan kelompok-kelompok sayap kanan seperti Pegida dan partai oposisi Merkel yaitu Partai AfD.

Motivasi selanjutnya disusul dengan persaingan antara institusi politik domestik yang memanfaatkan isu ini sebagai strategi politik untuk meraih pendukung. Partai besar CDU yang merupakan partai petahana Angela Merkel menggunakan kebijakan NetzDG sebagai salah satu cara menghambat perkembangan partai oposisi AfD. Dalam beberapa tahun terakhir, partai AfD memperoleh peningkatan suara pendukung yang signifikan melalui laman penggemar di Facebook yang menggunakan isu pengungsi dan ujaran kebencian sebagai strategi utama. Sedangkan untuk motivasi hak kekayaan intelektual dalam praktiknya tidak memiliki pengaruh secara langsung sebagai motivasi sensor internet yang ada di Jerman melalui kebijakan NetzDG.

Pada bab lima penelitian ini, dijelaskan mekanisme sensor internet Facebook, Google (Youtube) dan Twitter. Ketiga platform media tersebut, menyediakan dua jalur dalam pelaporan konten yang dilarang yaitu melalui jalur pedoman komunitas masing-masing platform dan jalur khusus pelaporan NetzDG bagi masyarakat Jerman. Berdasarkan argumentasi Barney Warf dan Open Net Initiative, mekanisme sensor internet dalam kebijakan NetzDG termasuk tipe penyaringan selektif dimana penyensoran hanya terjadi pada konten yang merugikan dan situs kecil tertentu. Sedangkan metode yang digunakan mengacu pada Murdoch dan Anderson adalah metode penyaringan konten TCP/IP dengan memetakan pola atau kata kunci tertentu yang masuk dalam daftar hitam. Setelah

berjalan dua periode sejak diberlakukannya NetzDG, laporan transparansi platform menunjukkan bahwa Facebook memiliki laporan terendah dibandingkan Google dan Youtube. Hal ini disebabkan akses pelaporan NetzDG di Facebook menggunakan situs tertentu yang sulit ditemukan pengguna. Meskipun begitu, ketiga platform media raksasa tersebut dinilai belum maksimal dalam menjalankan peninjauan konten sesuai aturan NetzDG.

Sementara itu, untuk mengetahui pengaruh kebijakan NetzDG terhadap tingkat kebebasan berpendapat di Jerman, penelitian ini menggunakan indeks dari tiga lembaga penelitian yaitu BertelsmannStiftung berskala nasional di Jerman, Economist Intelligence Unit yang melihat secara regional dan Freedom House yang mencakup keseluruhan skala nasional, regional dan internasional. Dari ketiga lembaga tersebut, secara garis besar memang terdapat penurunan pada tingkat kebebasan berpendapat di Jerman yang disebabkan oleh kebijakan ini baik secara tersurat ataupun tersirat khususnya pada tahun 2017 dan 2018. Namun demikian, Jerman masih berada di posisi atas negara-negara dengan kualitas demokrasi tertinggi di wilayah Eropa Barat dan dunia. Sedangkan untuk melihat pengaruh kebijakan NetzDG pada tingkat ujaran kebencian secara daring pada tahun 2017-2018 diukur berdasarkan tipe ujaran kebencian tersebut yaitu Rasisme, Anti Semitis, Islamophobia, Anti Pengungsi dan Xenophobia. Empat dari lima indikator tersebut mengalami penurunan paska diberlakukannya kebijakan NetzDG di Jerman kecuali indikator xenophobia yang mengalami peningkatan walaupun tidak sampai 10%.

Berdasarkan analisa pada bab 4 dan bab 5, dapat diasumsikan bahwa hipotesa penelitian ini dapat dikonfirmasi dan dibuktikan kebenarannya. Jerman melalui kebijakan NetzDG menerapkan mekanisme sensor internet dalam bentuk penyaringan selektif dengan metode penyaringan konten. Sehingga ada implikasi yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah, politi hingga perusahaan platform media sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya kebijakan NetzDG, dapat dibuktikan bahwa pengguna media sosial dapat tetap menyuarakan pendapatnya terkait isu tertentu dengan catatan tidak mengandung konten yang merugikan atau konten yang terdapat pada aturan. Hal ini dapat dibuktikan melalui indeks kebebasan berpendapat Jerman yang cenderung stabil walaupun terdapat

sedikit penurunan pada periode waktu 2017-2018. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini secara tidak langsung juga dapat mengurangi maraknya konten yang mengandung ujaran kebencian daring di media sosial seperti Rasisme, Anti Semitis, Islamophobia, Anti Pengungsi dan Xenophobia.

## 6.2 Saran

Penelitian ini memberikan saran terhadap kebijakan NetzDG dalam menangani konten ilegal khususnya ujaran kebencian yaitu<sup>1</sup>:

### 1. Transparansi dan Penelitian

Tantangan utama dari kebijakan ini di masa mendatang adalah memahami lebih lanjut kompleksitas media sosial dan fungsinya yang penting baik bagi otoritas penegak hukum hingga masyarakat pengguna media sosial. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut tentang dampak yang diberikan oleh NetzDG baik dilakukan perusahaan platform ataupun bagian pemerintah yang khusus menangani isu ini. Transparansi adalah titik awal dan bagian dari hukum yang telah diterima masyarakat, namun fokusnya harus lebih kepada prosedur perusahaan dalam meninjau konten-konten ilegal yang ada bukan jumlah keluhan yang dilaporkan. Laporan transparansi ke depannya diharapkan untuk dapat mencantumkan detail tentang teknis dan operasionalisasi peninjauan konten yang dilaporkan serta melakukan kontrol kualitas konten yang dihapus.

### 2. Prosedur dan Struktur Desain

Ada beberapa cara untuk meningkatkan hak pengguna dan memastikan proses peninjauan batasan konten NetzDG baik pada platform ataupun secara umum. Pertama, NetzDG menyoroti pentingnya pemikiran desain untuk intervensi yang dihadapi pengguna, seperti mekanisme keluhan. Kedua, NetzDG menawarkan sedikit bantuan bagi pengunggah yang percaya bahwa konten mereka telah dihapus secara salah. Cara ketiga untuk melindungi kebebasan berekspresi adalah dengan meningkatkan hak pemberitahuan pengunggah. Laporan transparansi NetzDG menunjukkan

---

<sup>1</sup> Heidi Tworek & Paddy Leersen, *Op.Cit.*, h.h 8-10

bahwa tidak ada platform utama yang memberi tahu pengunggah tentang kemungkinan keluhan yang disampaikan tentang konten mereka.

### 3. Hubungan Multi-Stakeholder

Ada banyak pendekatan potensial lainnya untuk mendefinisikan kembali hubungan antara platform, pemerintah, masyarakat sipil, dan pengguna. Salah satunya adalah merancang mekanisme transparansi yang kuat yang memungkinkan penelitian tentang pertanyaan mendesak tentang media sosial dan dampak sosialnya yang lebih luas sebelum pemerintah melakukan regulasi apa pun. Pendekatan lain adalah pembentukan badan banding independen untuk keputusan penghapusan. Ketiga, mempertimbangkan mekanisme peradilan cepat tanggap untuk mengadili pengaduan. Keempat, pembentukan Dewan Media Sosial yang secara teratur mengadakan platform, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk berbagi informasi dan memperdebatkan kemungkinan pendekatan baru.

